

**PENGARUH KOMPETENSI SDM, PENERAPAN SAP BERBASIS AKRUAL,  
SIMDA, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP RELEVANSI  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Empiris Pada SKPD Kantor Walikota Yogyakarta)**

**Sri Ayem**

Prodi Akuntansi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa,  
email: [sriayemfeust@gmail.com](mailto:sriayemfeust@gmail.com)

**Idham Husen**

Prodi Akuntansi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa,  
email: [Brotherssemmy23@gmail.com](mailto:Brotherssemmy23@gmail.com)

**Abstract**

*This research was conducted to test the factors that affect the relevance of local government financial statements. The factors studied were the influence of Human Resources competencies, the application of the accrual-based government accounting standards, the regional management information system, and Internal Control System. The population that used in this study is the regional working units (SKPD) the that there inside Mayor's Office Yogyakarta. The study sample was obtained from the structural officers, employees / staff the that performs the function of accounting / financial administration in their respective offices on SKPD, the that there inside Mayor's Office Yogyakarta, then be obtained of the respondent as much 105 respondents. Collecting data in this study is to directly deploy questionnaires to the respondent. The data collected were processed using SPSS Version 17. The method used to test the hypothesis is multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that : The influence of Human Resources competencies not the effect positive and significant on the relevance of local government financial statements, the application of the accrual-based government accounting standards the effect positive and significant on the relevance of local government financial statements, the regional management information system not the effect positive and significant on the relevance of local government financial statements, and Internal Control System the effect positive and significant on the relevance of local government financial statements.*

**Keywords :** *Human Resources competencies, accrual-based government accounting standards, regional management information system, internal control system, and relevance of local government financial statements.*

**PENDAHULUAN**

Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang bertujuan untuk menyediakan/ memproduksi barang-barang publik. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk

menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik (Ulum, 2004). Organisasi sektor publik yang sering diidentikkan dengan pemerintahan atau badan usaha yang mayoritas kepemilikannya berada di tangan pemerintah bertanggungjawab untuk

melakukan pelayanan publik untuk memenuhi kesejahteraan di berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, keamanan, kebebasan beragama dan beberapa hal lainnya.

Agar laporan keuangan dapat memenuhi tujuannya diperlukan karakteristik kualitas laporan keuangan, salah satu karakteristik kualitas laporan keuangan yaitu relevan. Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Agar relevansi ini dapat tercapai, maka laporan keuangan harus disajikan tepat waktu (*Timeliness*), (KKAP, Lampiran I: par. 35-40 dalam Sari dan Witono *et al*/2014).

Kompetensi sumber daya manusia sangat berperan penting pada organisasi pemerintah. Sumber daya manusia adalah pengelola dan memiliki tanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, dalam organisasi pemerintahan sangat dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam melaksanakan tugas-tugasnya (Megawati, dkk *at al* 2015), sehingga untuk menghasilkan laporan keuangan diperlukan orang-orang yang berkompoten. Kompetensi sumber daya manusia sangat diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat berkualitas dan bermanfaat dalam hal pengambilan keputusan (Wati, dkk *at al*/2014).

Dengan adanya penetapan PP No. 71 Tahun 2010 maka penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Hal

iniberarti pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan standar akuntansi pemerintahan yang baru yaitu standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang harus dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2015. Hal ini sesuai dengan pasal 32 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan hal ini ditegaskan dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa pemerintah menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), (Putra dan Ariyanto *at al*/2015).

Guna mewujudkan praktik pengelolaan keuangan daerah yang cepat, tepat, dan akurat, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengembangkan sistem aplikasi komputer yang dapat mengolah data transaksi keuangan menjadi laporan keuangan yang dapat dimanfaatkan setiap saat, yakni Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sebuah sistem berbasis aplikasi teknologi yang dikembangkan untuk mendukung tercapainya akuntabilitas bagi pemerintah daerah baik ditingkat pelaporan (SKPKD) ataupun ditingkat akuntansi (SKPD). Aplikasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan dan penatausahaan APBD dan pertanggungjawaban APBD, (Nugraha dan Astuti *et al*/2013).

Pengendalian intern diharapkan mampu mencegah atau mendeteksi terjadinya

kesalahan dalam proses akuntansi serta dapat memberikan perlindungan bagi data organisasi dari adanya ancaman penyelewengan atau sabotase sistem. Pengendalian intern disusun agar pelaporan keuangan dapat memenuhi asas ketertiban yang merupakan cerminan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Perwujudan dari asas ketertiban tersebut adalah dengan penyampaian pelaporan keuangan secara tepat waktu (Mirnayanti, 2013 dalam Roshanti, dkk *et al* 2014).

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Roshanti, dkk (2014) dengan judul penelitian “pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (SKPD Kabupaten Buleleng)”. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada penambahan variabel pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, penggantian variabel pemanfaatan teknologi informasi diganti dengan sistem informasi manajemen daerah, serta menguji pengaruhnya terhadap relevansi laporan keuangan pemerintah daerah, dan letak lokasi penelitian yang berbeda. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, sistem informasi manajemen daerah, dan sistem pengendalian intern menjadi faktor penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan, maka penelitian ini pada SKPD Kantor Walikota Yogyakarta, sehingga penelitian ini diberi judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia,

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Sistem Informasi Manajemen Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Relevansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kantor Walikota Yogyakarta)“.

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti diantaranya:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, sistem informasi manajemen daerah, dan sistem pengendalian intern secara simultan berpengaruh positif terhadap relevansi laporan keuangan pemerintah daerah ?
2. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap relevansi laporan keuangan pemerintah daerah ?
3. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual berpengaruh positif terhadap relevansi laporan keuangan pemerintah daerah ?
4. Apakah sistem informasi manajemen daerah berpengaruh positif terhadap relevansi laporan keuangan pemerintah daerah ?
5. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap relevansi laporan keuangan pemerintah daerah ?

## **LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Landasan Teori**

1. Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

## 2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 adalah "Laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan (Andini dan Yusrawati *at all* 2015)".

## 3. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

### a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya (Putri *at all* 2014).

Halim (2007:23) menjelaskan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau Daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihaklain sesuai

ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### b. Reliabel (Andal)

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, sertadapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat ataupenyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

## 4 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi dapat diartikan sebagai cerminan dari kemampuan seseorang di bidang tertentu seperti komunikasi verbal, kemampuan presentasi, pengetahuan teknis, kemampuan mengelola tekanan pekerjaan, dan kemampuan membuat perencanaan dan keputusan (Soemardi, dkk *at all* 2010 dalam Putri *at all* 2014).

Menurut Spencer dan Spencer (1993), yang dikutip oleh Sutrisno (2009:221) mengatakan bahwa: Kompetensi adalah suatu yang mendasari karakteristik dari suatu individu yang dihubungkan dengan hasil yang diperoleh dalam suatu pekerjaan. Kompetensi sebagai karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya

Basis akuntansi akrual, seperti yang telah disimpulkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP, 2006:3), adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memerhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Selanjutnya, dalam makalah yang sama, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menyatakan bahwa dalam

akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Halim dan Kusufi (2012:53) menyimpulkan bahwa basis akrual mampu memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas, tujuan pelaporan tersebut adalah tujuan manajerial dan pengawasan (Faradillah *at all* 2013).

#### 5. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan dikenal dengan Aplikasi SIMDA merupakan salah satu produk dari teknologi sistem informasi yang digunakan oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerahnya. Menurut Djaja dalam (Budiman, Fuad dan Arza, Fefri Indra. 2013), Aplikasi SIMDA merupakan aplikasi database yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Aplikasi SIMDA dikembangkan dengan memperhatikan dan mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

#### 6. Sistem Pengendalian Intern

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk meyakinkan *stakeholders* maupun publik tentang

keakuratan dan keandalan laporan keuangan yang dibuat pemerintah maka dibutuhkan sistem pengendalian intern yang optimal (Roshanti, dkk *at all* 2014).

#### Penelitian Terdahulu Dan Perumusan Hipotesis

Penelitian yang dilakukan oleh Madjham, dkk yang berjudul "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara (Studi Kasus Pada DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara)". Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa secara simultan pengaruh sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Sedangkan koefisien regresi dalam penelitian ini menunjukkan arah positif sehingga dapat dikatakan bahwa semakin baik sistem pengendalian intern pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara maka kualitas laporan keuangan juga akan semakin meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Witono (2014) yang berjudul "Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Daerah Ditinjau Dari Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi". Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa secara simultan sumber daya manusia, pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan maupun ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji secara simultan hubungan antara kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, sistem informasi manajemen daerah, dan sistem pengendalian intern terhadap relevansi laporan keuangan pemerintah daerah,

maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

***H<sub>1</sub>*** : Secara simultan terdapat pengaruh positif antara kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, sistem informasi manajemen daerah, dan sistem pengendalian intern terhadap relevansi laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Megawati, dkk (2015), yang menemukan bukti empiris bahwa kompetensi sumber daya manusia di sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang ada di tiga dinas Kabupaten Buleleng diakui sangat bagus dalam penyajian laporan keuangan daerah. Begitu juga dengan penelitian Wati, dkk (2014), yang menemukan bukti empiris bahwa secara garis besar kompetensi sumber daya manusia di sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang ada di Kabupaten Buleleng sudah mencukupi, baik dari sisi jumlah maupun kualifikasinya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan antara kompetensi sumber daya manusia terhadap relevansi laporan keuangan pemerintah daerah, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

***H<sub>2</sub>*** : Terdapat pengaruh positif antara kompetensi sumber daya manusia terhadap relevansi laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Humiang, dkk yang menemukan bukti empiris bahwa dari segi mempersiapkan SDM pemerintah mengadakan pelatihan atau bimbingan teknis kepada pegawai yang terkait dengan pelaksanaan standar akuntansi berbasis akrual yang didampingi langsung oleh BPKP, dari segi komitmen pimpinan, adanya penganggaran untuk pelaksanaan

akrual, kemudian merevisi Peraturan Pemerintah daerah yang meliputi peraturan daerah, pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi serta sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kota Bitung, dan dari segi sarana dan prasarana sistem informasi, Pemerintah Kota Bitung menggunakan produk software dari BPKP yaitu SIMDA versi baru 2.7 yang sudah bisa mengakomodir terkait Standar Akuntansi Berbasis Akrual. Berdasarkan 3 indikator kesiapan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah kota Bitung telah siap menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan antara penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual terhadap relevansi laporan keuangan pemerintah daerah, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

***H<sub>3</sub>*** : Terdapat pengaruh positif antara penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual terhadap relevansi laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Nugraha dan Astuti (2013) yang menemukan bukti empiris bahwa aplikasi SIMDA Keuangan telah menghasilkan informasi laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya dengan kualitas relevansi, akurasi dan ketepatan waktu yang lebih baik daripada pengolahan dengan sistem sebelumnya atau sistem manual. Namun koreksi kesalahan data setelah diterbitkannya SP2D memiliki prosedur yang cukup rumit sehingga menghambat proses koreksi tersebut. Begitu juga dengan penelitian Halens Ryanlie Ole yang menemukan bukti empiris aplikasi SIMDA Keuangan mampu menghasilkan informasi dengan ketepatan atau tingkat kebenaran

yang lebih baik bila dibandingkan dengan pengolahan data manual, dapat membantu Pimpinan (Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran) dalam mengambil keputusan sesuai data dan informasi yang ada, dan Sistem Pengendalian Intern berjalan dengan baik dimulai dari Penganggaran, Penatausahaan sampai pada pelaporan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan antara sistem informasi manajemen daerah terhadap relevansi laporan keuangan pemerintah daerah, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

*H<sub>4</sub> : Terdapat pengaruh positif antara sistem informasi manajemen daerah terhadap relevansi laporan keuangan pemerintah daerah.*

Penelitian Dewi, dkk (2014) yang menemukan bukti empiris bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan pemerintah daerah dan nilai informasi laporan keuangan pada SKPD di Kabupaten Buleleng. Begitu juga dengan penelitian Roshanti, dkk (2014) yang menemukan bukti empiris bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan antara sistem pengendalian intern terhadap relevansi laporan keuangan pemerintah daerah, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

*H<sub>5</sub> : Terdapat pengaruh positif antara sistem pengendalian intern terhadap relevansi laporan keuangan pemerintah daerah.*

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data penelitian yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber asli (tanpa perantara), sedangkan sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari jawaban atas kuesioner yang dibagikan kepada responden.

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil lokasi penelitian di Kantor Walikota Yogyakarta.

### **Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara mendatangi dan membagikan kuesioner secara langsung kepada Pejabat, para staf, dan pegawai di masing-masing Dinas pada SKPD yang ada di Kantor Walikota Yogyakarta. Teknik ini memberikan pertanggungjawaban kepada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan.

### **Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini metode analisis data menggunakan software statistik yaitu SPSS (*Statistic Package for Social Science*) versi 17 sebagai alat bantu dalam menganalisis dan mengolah data. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis kuantitatif. Pengujian yang dipakai dalam analisis data penelitian ini adalah:

#### **1. Uji Kualitas Data**

##### **a. Uji Validitas**

Menurut Ghazali (2011:52), uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu item dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh

kuesioner tersebut. Agar data yang diperoleh bisa relevan/sesuai dengan tujuan uji validitas yang digunakan adalah dengan cara menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan skor setiap konstruksinya. Pengujian ini menggunakan metode *Korelasi Bivariate Pearson* (Produk Momen Pearson) dimana peneliti ingin membuktikan keberadaan hubungan antara dua variabel. Jika korelasi skor masing-masing butir pertanyaan dengan tiap konstruksinya akan dikatakan valid apabila signifikan pada level 0.05 (Ghozali, 2011).

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011:47).

Uji reliabilitas ini menggunakan teknik *Cronbach's alpha* ( $\alpha$ ). Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel dengan menggunakan teknik ini, bila koefisien reliabilitas ( $r_i$ ) > 0,70 (Ghozali, 2011;48).

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan dependen keduanya memiliki distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2011:160). Uji normalitas akan terpenuhi apabila sampel yang digunakan lebih dari 30, untuk mengetahui normalitas distribusi data dapat dilakukan dengan menggunakan analisis statistik yaitu *Kolmogorov-Smirnov test*. Jika nilai signifikan dari pengujian *One Sample Kolmogorov Smirnov Test* > 0,05 maka

data mempunyai distribusi normal (Ghozali, 2011:164).

b. Uji Multikolonieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan atau korelasi diantara variabel independen. Multikolonieritas menyatakan hubungan antar sesama variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2011:105). Deteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *tolerance*. Regresi bebas dari multikolonieritas jika besar nilai VIF  $\geq 10$  dan nilai *tolerance*  $\leq 0,10$  (Ghozali, 2011:106).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat persamaan atau perbedaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik apabila varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap atau homokedastis (Ghozali, 2011;139). Metode yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan uji *glejser* dengan probabilitas signifikannya diatas tingkat kepercayaan  $\alpha = 5\%$  atau 0.05 (Ghozali, 2011;143).

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Model regresi berganda dalam pernyataan ini dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

*Keterangan:*

Y = Relevansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3,$  dan  $\beta_4$  = Koefisien Regresi

- $X_1$  = Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia
- $X_2$  = Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua
- $X_3$  = Sistem Informasi Manajemen Daerah
- $X_4$  = Sistem Pengendalian Intern
- $\varepsilon$  = Variabel Pengganggu / Error

variabel dependen amat terbatas (Ghozali, 2011:97).  $R^2$  memiliki nilai antara 0 dan 1 ( $0 < R^2 < 1$ ), dimana bila makin tinggi nilai  $R^2$  suatu regresi tertentu akan semakin baik. Berarti keseluruhan variabel independen secara bersama-sama mampu menerangkan variabel dependen (Sari, 2016).

#### **4. Pengujian Hipotesis**

##### **a. Uji Statistik F**

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011:98). Tingkat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 95% atau signifikansi 5% ( $\alpha=0,05$ ). Uji statistik F dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel, apabila nilai F hitung lebih besar daripada F tabel maka model yang digunakan layak demikian juga sebaliknya.

##### **b. Uji Statistik t**

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011:98). Tingkat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 95% atau signifikansi 5% ( $\alpha=0,05$ ). Uji statistik t dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel, jika t hitung  $\geq$  t tabel maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima demikian juga sebaliknya.

##### **c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **Deskripsi Data Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data primer. Data primer diperoleh dari jawaban responden dalam kuesioner. Kuesioner digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan responden dan untuk mendapatkan jawaban-jawaban mengenai masalah yang dibahas oleh peneliti. Metode pengumpulan datanya menggunakan teknik *Purposive Sampling* dengan kuesioner yang disebar atau dibagikan secara langsung kepada responden yang bekerja di tiap-tiap SKPD yang ada di dalam Kantor Walikota Yogyakarta.

##### **Uji Statistik F**

Hasil uji statistik F Anova disajikan pada tabel 1.

Dari tabel 1 diperoleh nilai F hitung sebesar 40.897 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai F hitung  $>$  F tabel (2,46), hal ini berarti bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrua, sistem informasi manajemen daerah, dan sistem pengendalian intern secara simultan berpengaruh terhadap relevansi laporan keuangan pemerintah daerah.

##### **Uji Statistik t**

Hasil Uji Statistik t disajikan pada tabel 2.

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Statistik F**  
**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	338.645	4	84.661	40.897	.000 <sup>a</sup>
	Residual	207.012	100	2.070		
	Total	545.657	104			

a. Predictors: (Constant), Kompetensi SDM, Penerapan SAP Berbasis Akrua, Sistem Informasi Manajemen Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern.

b. Dependent Variable: Relevansi LKPD

**Sumber : Data Primer Diolah**

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Statistik t**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized		Standardized	t	Sig.
		Coefficients	Coefficients	Beta		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.000	1.649		1.213	.228
	Kompetensi SDM	-.077	.078	-.104	-.986	.326
	Penerapan SAP Berbasis Akrua	.098	.029	.427	3.325	.001
	Sistem Informasi Manajemen Daerah	.101	.055	.208	1.826	.071
	Sistem Pengendalian Intern	.127	.041	.308	3.102	.002

a. Dependent Variable: Relevansi LKPD

**Sumber : Data primer Diolah**

Dari tabel 2 tersebut dapat disimpulkan dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Apabila nilai t hitung > t tabel maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dari tabel tersebut juga dapat disimpulkan bahwa Variabel kompetensi sumber daya manusia membuktikan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap relevansi laporan keuangan pemerintah daerah.

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Variabel penerapan standar

akuntansi pemerintah berbasis akrua membuktikan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrua berpengaruh positif dan signifikan terhadap relevansi laporan keuangan pemerintah daerah.

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Variabel sistem informasi manajemen daerah membuktikan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_3$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sistem informasi manajemen daerah tidak

berpengaruh positif dan signifikan terhadap relevansi laporan keuangan pemerintah daerah.

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Variabel sistem pengendalian intern membuktikan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_4$  diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap relevansi laporan keuangan pemerintah daerah.

**Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Hasil uji koefisien Determinasi ( $R^2$ ) disajikan pada tabel 3.

berbasis akrual, sistem informasi manajemen daerah, dan sistem pengendalian intern berpengaruh secara simultan terhadap relevansi laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil uji hipotesis 1 pada tabel 2 memperlihatkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap relevansi laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Megawati, dkk (2015) dan Wati, dkk (2014).

Hasil uji hipotesis 2 pada tabel 2 memperlihatkan bahwa variabel penerapan

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**  
**Model Summary**

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Standar Error of the Estimate</i>
1	.788 <sup>a</sup>	.621	.605	1.439

a. Predictors: (Constant), Kompetensi SDM, Penerapan SAP BerbasisAkrual, Sistem Informasi Manajemen Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern.

**Sumber : Data Primer Diolah**

Berdasarkan tabel 3 tersebut diperoleh *Adjusted R Square* sebesar 0,605 artinya besarnya pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, sistem informasi manajemen daerah, dan sistem pengendalian intern terhadap relevansi laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 61% sisanya sebesar 39% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

**Pembahasan**

Dari hasil pengolahan data sebelumnya dengan Uji F pada tabel 1 dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah

standar akuntansi pemerintah berbasis akrual berpengaruh signifikan dan positif terhadap relevansi laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Humiang, dkk, Putra dan Ariyanto (2015).

Hasil uji hipotesis 3 pada tabel 2 memperlihatkan bahwa variabel sistem informasi manajemen daerah tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap relevansi laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugraha dan Astuti (2013) dan Ryanlie Ole.

Hasil uji hipotesis 4 pada tabel 2 memperlihatkan bahwa variabel sistem

pengendalian intern berpengaruh signifikan dan positif terhadap relevansi laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi, dkk (2014) dan Roshanti, dkk (2014).

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, sistem informasi manajemen daerah, dan sistem pengendalian intern berpengaruh secara simultan terhadap relevansi laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap relevansi laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual berpengaruh positif dan signifikan terhadap relevansi laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Sistem informasi manajemen daerah tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap relevansi laporan keuangan pemerintah daerah.

5. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap relevansi laporan keuangan pemerintah daerah.

### Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dari hasil analisis data dan pembahasan, kompetensi sumber daya manusia tidak mendukung relevansi laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga kompetensi sumber daya manusia di tiap-tiap SKPD yang ada di Kantor Walikota Yogyakarta masih perlu ditingkatkan lagi agar relevansi laporan keuangan pemerintah daerah yang di hasilkan dapat lebih baik lagi.
2. Dari hasil analisis data dan pembahasan, sistem informasi manajemen daerah juga tidak mendukung relevansi laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga sistem informasi manajemen daerah di tiap-tiap SKPD yang ada di Kantor Walikota Yogyakarta masih perlu ditingkatkan lagi dalam hal pengoperasian teknologi informasinya agar relevansi laporan keuangan yang dihasilkan semakin baik, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat luas khususnya yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

## DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, dkk. (2014), "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan keuangan Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)", *e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen* (Volume 2 Tahun 2014).
- Ghozali, Imam (2011), *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Humiang, dkk. "Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dan Dampaknya Terhadap Sumber Daya Manusia Pada Pemerintah Kota Bitung", *Jurnal publikasi*.

- Madjham, dkk. "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara (Studi Kasus Pada DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara)". *Program Studi S1 Akuntansi Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo, Jurnal publikasi*.
- Megawati, dkk. (2015), "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Tiga Dinas Kabupaten Buleleng)". *e-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3 No. 1)*.
- Nugraha dan Astuti (2013), "Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan) Dalam Pengolahan Data Keuangan Pada Organisasi Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk) Universitas Negeri Malang". *Jurnal Akuntansi Aktual, Vol. 2, Nomor 1, Januari 2013, hlm. 25–33*.
- Nurillah (2014), "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok)". *Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang*.
- Putra dan Ariyanto (2015), "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI. ISSN: 2302-8556. *e-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 13.1 (2015): 14-32*.
- Republik Indonesia (2003), Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia (2004), Undang-Undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara.
- Republik Indonesia (2005), Peraturan pemerintah Nomor 24 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Republik Indonesia (2004), Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia (2005), Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia (2006), Peraturan Pemerintah Nomor 6 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.
- Republik Indonesia (2006), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia (2008), Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Republik Indonesia (2010), Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Roshanti, dkk. (2014), "Pengaruh Kualitas SDM, Pemanfaatan TI, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah". *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No: 1 Tahun 2014)*.
- Ryanlie Ole. "Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi Kasus Pada Dinas PPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara)". *Jurnal publikasi*.

- Sari dan Witono (2014), "Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Daerah Ditinjau Dari Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta". *Seminar Nasional dan Call for Paper (Sancall 2014)*: ISBN: 978-602-70429-1-9. Research Methods And Organizational Studies Hlm. 418-425.
- Wati, dkk. (2014), "Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah". *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. Jurusan Akuntansi Program S1* (Volume 2 No: 1 Tahun 2014).